

BAB II

NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE

Republica Democratica de Timor-Leste (RDTL) atau yang biasa disebut sebagai Negara Timor-Leste merupakan negara termuda di Asia Tenggara dan merupakan salah satu negara yang merdeka di abad ke XXI. Sebab, walaupun pada 28 November 1975 Fretilin secara unilateral mendeklarasikan kemerdekaan bagi Timor-Leste, namun kemerdekaan Timor-Leste baru diakui secara resmi sebagai negara merdeka dan berdaulat pada tanggal 20 Mei 2002 setelah 83 % masyarakat Timor-Leste memilih Xanana Gusmão sebagai presiden Timor-Leste melalui pemilihan umum pada 14 April 2002.

A. Sejarah Berdirinya Negara Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL)

Jika dilihat dari sejarahnya, Timor Leste pernah mengalami proses penjajahan yang cukup panjang. Pada pertengahan abad ke-enam belas yaitu pada tahun 1515 hingga tahun 1975 Timor-Leste berada dibawah kekuasaan Bangsa Portugis (Hays, 2015). Kemudian dari tahun 1975 hingga 1999, Timor-Leste berada dibawa kekusaan Indonesia, dan dari tahun 1999–2002 Timor-Leste dibawa kontrol PBB yang diwakili oleh UNTAET (Molnar, 2005). Nama yang digunakan pada masa penjajahan Portugis adalah Timor-Portugis. Setelah berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nama tersebut berubah menjadi Timor-Timur, kemudian berubah menjadi Timor-Leste setelah Timor-Leste memperoleh kemerdekaan pada 20 Mei 2002.

Kehadiran Bangsa Portugis di Pulau Timor pada waktu itu, tidak lain adalah selain untuk menyebarkan agama kristen juga untuk melakukan perdagangan kayu cendana dan kopi yang ada di Timor-Leste. Berbagai macam cara dilakukan oleh Portugis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan pajak berupa barang (*funtas*) serta menerapkan sistem kerja paksa. Akibatnya banyak raja (*liurai*) yang melakukan pemberontakan terhadap Portugis. Salah satu pemberontakan

terbesar yang dilakukan oleh rakyat Timor-Portugis waktu itu adalah pemberontakan Boaventura atau dikenal sebagai Perang Manufahi pada tahun 1910-1912. Pemberontakan ini dipimpin oleh raja Dom Boaventura, seorang liurai (*raja*) dari Manufahi yang mengakibatkan sekitar 3.000 orang Timor-Portugis terbunuh dan sekitar 4.000 ditawan Portugal (Gunn, 2005 : 266).

Ketika terjadi revolusi bunga di Portugal pada 25 April 1974 yang mengakibatkan tumbangnya rezim Marcello Caetano, rezim baru dibawa kepemimpinan Jenderal Antonio de Spínola menerapkan kebijakan politik dekolonisasi untuk semua daerah jajahan Portugal baik di Asia maupun di Afrika, tak terkecuali Timor-Timur (Makarim *et al.*, 2003 :22). Pada 28 April 1974, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 1514/1960 tentang Prinsip Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi bangsa jajahan, rezim Spínola memberikan izin kepada rakyat Timor-Portugis untuk mendirikan partai politik agar dapat menentukan nasib sendiri melalui referendum yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 1975. Referendum ini meliputi tiga opsi atau pilihan yaitu antara lain; *pertama*; menjadi daerah otonomi dalam federasi dengan Portugal, *kedua* menjadi negara merdeka dan berdaulat di luar persemakmuran Portugis dan terakhir bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahmat, 2014 :15).

Dengan demikian pada Mei 1974, mulai terbentuk partai politik di Timor-Portugis. Pada awalnya terdapat tiga (3) partai politik yang muncul pada waktu itu. Pada 11 Mei 1974 terbentuk partai UDT dengan diketuai oleh Fransisco Lopez da Cruz dan menjadi partai politik pertama yang muncul di Timor Portugis kala itu. Sebagian anggota partai UDT merupakan anggota organisasi ANP (Accção Nacional Portugues) yang merupakan satu-satunya partai politik yang ada pada masa kekuasaan Caetano (Cabral, 2003:1-2). Sehingga Partai UDT cenderung menginginkan integrasi dengan Portugal. Setelah itu, pada 20 Mei 1974 terbentuk partai ASDT yang kemudian bertransformasi menjadi partai Fretilin pada 11 September 1974 dengan menggunakan manifesto ASDT yang diterbitkan

pada 22 Mei 1974 yaitu “Menegaskan hak penentuan nasib sendiri, dan sikap anti penjajahan namun tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan baik dengan negara kawasan tanpa merugikan kepentingan rakyat Timor” (Rahmat,2014:4-5). ASDT dipimpin oleh Fransisco Xavier do Amaral, sedangkan Fretilin dipimpin oleh Nicolão Lobato. Selanjutnya partai APODETI pada 27 Mei 1974 yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araujo. Sebelumnya partai ini bernama AITI (Associação Para Integração de Timor na Indonesia) atau Perhimpunan untuk Integrasi Timor di Indonesia (da Cruz, 1999:36). Walaupun berubah namanya namun cita-citanya tetap ingin bergabung dengan Indonesia, sehingga partai ini sering mendapatkan bantuan dari Indonesia, misalnya dari BAKIN (*Indonesian Intelligence Service*) memberikan bantuan berupa moral, finansial, pakaian (*clothes*) dan radio. Selain ketiga partai tersebut, terdapat dua partai yang muncul belakangan antara lain; KOTA (Kelibuar Oan Timor Asuwain) dan Trabalista yang cenderung mengedepankan perjuangan demi hak buruh, mayoritas anggota partai ini adalah tuan tanah (Cabral, 2003:169).

Perbedaan cita-cita akan masa depan Timor Portugis yang terdapat dalam partai politik ini membuat mereka sering bersengketa. Pada 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta terhadap Fretilin yang membuat UDT berhasil menguasai tempat-tempat strategis seperti stasiun radio, markas besar Angkatan Darat dan Polisi (Tempo. 1975). Selain itu, hampir semua rumah di Dili mengibarkan bendera UDT. Disamping itu, mereka juga melakukan kampanye atau propaganda di tempat umum seperti pasar agar rakyat tidak masuk Fretilin yang bagi UDT dianggap sebagai komunis serta mengajak rakyat untuk masuk UDT (Suara Karya, 1975). Dalam hal ini, UDT juga ingin memerdekakan Timor-Portugis tapi bukan dibawa kekuasaan Fretilin yang dianggap komunis melainkan berintegrasi dalam persemakmuran Portugis (*integration into common-wealth of Portuguese*). Tanggal 18 Agustus pasukan bersenjata FRETILIN yaitu FALINTIL (*Forças Armadas de Libertação Nasional de Timor-Leste*) dibawa komando

Rogeyro Tiago Lobato yang pada saat itu merupakan satu-satunya orang Timor yang memiliki pangkat tertinggi di angkatan darat Portugis melakukan serangan balik terhadap UDT (International Crisis Group, 2006:8). Tanggal 27 Agustus Gubernur Lemos Pires menarik mundur sekitar 3000 tentara Portugal meninggalkan kota Dili. Nasib kota Dili secara defacto diserahkan kepada pihak UDT dan Fretilin yang sedang bertikai. Tanggal 24 September 1975, Fretilin kembali melakukan serangan terhadap basis pertahanan UDT di perbatasan Batugade yang membuat Fretilin berhasil menduduki benteng batugade dan dijadikan sebagai basis pertahanan mereka. Pada 7 Oktober 1975 UDT dibantu dengan sukarelawan Indonesia berusaha untuk merebut kembali benteng Batugade (Suara Karya, 1975).

Situasi inilah yang kemudian mendorong sebagian rakyat Timor Portugis ingin bergabung dengan Indonesia. Sebab rakyat merasa tidak ada jalan lain kecuali berintegrasi dengan Indonesia. Keinginan berintegrasi ini diterima oleh banyak negara yang berdiri di belakang Indonesia, termasuk Amerika Serikat dan Australia. Walaupun belum ada pengakuan secara resmi dari PBB terkait integrasi Timor-Portugis kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menganggap Timor-Portugis sebagai daerah yang belum berpemerintahan sendiri (*non-self governing territory*) (Makarim, 2003:23).

Pada 28 November 1975, Fretilin secara unilaterally mendeklarasikan kemerdekaan Timor-Leste dengan Fransisco Xavier do Amaral sebagai presiden Timor-Leste (International Crisis Group, 2006 :8) dan Nicolau Lobato sebagai Perdana Menteri (timor-leste.gov.tl, 2012). Setelah 9 hari Fretilin mendeklarasi kemerdekaan bagi Timor-Leste, tepatnya tanggal 7 Desember 1975 Indonesia melakukan invasi di Timor-Leste. Setelah menguasai wilayah Timor-Leste secara de facto, maka dibentuklah Pemerintah Sementara dan Dewan Legislatif (DPRD I). Pada 17 Juli 1976, berpedoman pada undang-undang No. 7/1976, presiden Soeharto meresmikan Timor-Portugis sebagai Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur, dan

menjadi propinsi ke-27 di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan nama Propinsi Timor-Timur. Nama Timor-Portugis berubah menjadi Timor-Timur (Pinto, 2015).

Selama 24 tahun berintegrasi dengan NKRI, rakyat Timor-Timur terus berupaya menggalang dukungan internasional agar mendirikan negara sendiri. Terjadinya Insiden Santa Cruz 12 November 1991 serta penganugerahan hadiah novel perdamaian kepada Uskup Dom Carlos Filipe Ximenes Belo dan Jose Manuel Ramos Horta pada 1996 berhasil merobohkan kebijakan luar negeri Indonesia dan sangat berpotensi untuk mengukuhkan upaya menggalang dukungan untuk kemerdekaan Timor-Timur yang dilakukan oleh politikus Timor-Timur tersebut (Wahyono, 2009:50).

Pada tanggal 27 Januari 1999, Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto mengumumkan dua opsi bagi rakyat Timor-Leste yang pada dasarnya menyerahkan keputusan akhir masa depan Timor-Timur kepada masyarakat Timor-Timur sendiri. Dalam hal ini, masyarakat Timor-Timur dapat menentukan keputusannya melalui proses jajak pendapat untuk menerima atau menolak tawaran status Daerah Otonomi Khusus (DOK) yang diberikan. Jika mayoritas penduduk memilih status otonomi khusus, Timor-Timur akan tetap menjadi bagian integral dari NKRI. Sebaliknya, jika penawaran otonomi khusus ditolak, maka Timor-Timur akan berpisah dari Indonesia dan menentukan nasib sendiri.

Sesuai dengan resolusi DK PBB Nomor 1262 tanggal 27 Agustus 1999 tentang perpanjangan mandat UNAMET di Timor-Timur hingga 30 November 1999, akhirnya pada Senin, 30 Agustus 1999 dilaksanakan jajak pendapat (*popular consultation*) yang sebelumnya dijadwalkan akan dilaksanakan pada 8 Agustus 1999. Jajak pendapat yang berjalan dengan aman, tertib dan lancar ini diikuti oleh sebanyak 98.6% rakyat Timor-Timur yang menggunakan haknya di 200 Tempat Pemunggutan Suara (TPS) dan 850 kotak suara yang tersebar di seluruh Timor-Timur (Makarim, 2003:17).

Pada 3 September 1999, pukul 21.00 waktu New York, Sekjen PBB membacakan hasil jajak pendapat tersebut di

sidang khusus Dewan Keamanan PBB, dimana dari jumlah 451.796 atau 98.6% warga Timor-Timur yang ikut berpartisipasi dalam jajak pendapat, sebanyak 344.580 atau 78.50% suara menolak tawaran DOK atau ingin merdeka dan 94.388 atau 21.5% suara menerima DOK atau tidak ingin merdeka (STAE, 2012). Dengan demikian pada 19 Oktober 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menerima hasil jajak pendapat dan menghapus Ketetapan MPR tahun 1978 tentang integrasi Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Wahyono, 2009:56). Dengan demikian, mulai tahun 1999 pemerintahan Timor-Timur dibawa kontrol United Nations Transition Administration in East Timor (UNTAET) (Hollekim, 2007:8).

Pada tanggal 16 Maret 2001, United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) menetapkan Regulasi UNTAET No. 2001/2 tentang pemilihan Majelis Konstituante yang difungsikan untuk mempersiapkan Undang-Undang Dasar bagi Timor-Leste yang Merdeka dan Demokrasi. Pada tanggal 30 Agustus 2001 diselenggarakan pemilihan umum anggota Majelis Konstituante (*Constituent Assembly*) yang diikuti oleh 91.3% atau 382.968 orang dari sebanyak 421.018 orang yang memenuhi persyaratan (*eligible voters*). Pemungutan suara berlangsung di 818 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 13 Distrik untuk memilih delapan puluh delapan (88) anggota Majelis Konstituante dengan menggunakan sistem campuran, yaitu 75 orang calon nasional (sistem proporsional) dan 13 orang calon dari Distrik yang jumlahnya memang 13 (Sistem Distrik) (Wahyono, 2009: 87-88). Dari jumlah 88 kursi Majelis Konstituante, Partai Fretilin memperoleh 55 kursi, 33 kursi diperoleh oleh 11 Partai kecil yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan Majelis Konstituante tersebut (ES EOM, 2007:7).

Pada tanggal 15 September 2001, Sergio Viera de Mello selaku pemimpin UNTAET melantik 88 anggota Majelis Konstituante yang komposisinya memncerminkan hasil pemilihan umum. Maka pada tanggal 16 September 2001 secara resmi mulai menjalankan tugasnya untuk membahas

dan mempersiapkan rancangan konstitusi negara Timor-Timur dalam waktu 90 hari atau 3 bulan. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Majelis Konstituante berhasil menyelesaikan tata tertib persidangan (*rules of procedures*) sekaligus membentuk sebuah komite yang bertugas membuat rekomendasi dan membahas setiap rancangan undang-undang. Draft konstitusi yang dibahas mengarah pada kepada suatu bentuk negara kesatuan demokrasi Timor-Timur dengan pembagian kekuasaan, yaitu Fungsi presiden sebagai panglima angkatan bersejata, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan parlemen nasional yang akan membatasi kewenangan presiden.

Setelah Majelis Konstituante menyelesaikan draft Undang-Undang Dasar, maka pada 9 Februari 2001, Majelis Konstituante melakukan sidang pengesahan sementara Rancangan Undang-Undang Dasar. Dengan demikian pada 22 Maret 2002, Majelis konstituante menandatangani Konstitusi negara Timor-Leste yang merupakan produk hukum tertinggi negara. Dalam sidang ini juga Majelis Konstituante menyepakati untuk menyelenggarakan suatu pemilihan umum Presiden secara langsung. Maka pada tanggal 28 November 2001 Administrasi Peralihan mengumumkan bahwa pemilihan presiden Timor-Timur akan dilakukan pada bulan April 2002 (Wahyono, 2009:101).

Tanggal 14 April 2002, dengan dukungan PBB yang diwakili oleh UNTAET, Timor-Timur melakukan pemilihan presiden. Proses pemilihan umum yang berlangsung secara aman dan damai hanya diikuti oleh dua kandidat, yaitu Fransisco Xavier do Amaral yang didukung oleh partai ASDT (Associaçao Social Democrata Timorenses) dan PARENTIL (Partido Republika Nacional Timor Leste), dan mantan pejuang kemerdekaan José Alexander Kaí Rala Xanana Gusmão yang didukung oleh 10 (Sepuluh) partai, yaitu Fretilin, PSD (Partido Social Democrata), PD (Partido Democratico), UDT (Uniao Democratica Timorenses) KOTA (Klibur Oan Timor Asswain), PNT (Partido Nasionalista Timorenses), PST (Partido Socialista de Timor) UDC / PDC

(Partido Democrata Cristao), PTT (Partido Trabalhista Timorese), dan PDM (Partai Demokratik Maubere) (EU EOM, 2002 :9-10).

Dari hasil pemilihan tersebut tokoh pejuang Xanana Gusmão terpilih menjadi presiden Timor-Leste pertama dengan memperoleh suara sebanyak 82.69% dari total 364.780 jumlah suara sah. Sementara Fransisco Xavier do Amaral hanya memperoleh 17.31% suara. Tanggal 20 Mei 2002 tepat pukul 00:00 malam waktu Timor-Leste, Xanana Gusmão diambil sumpahnya, disertai dengan pengibaran bendera Timor-Leste. (Wahyono, 2009:106). Mulai hari itu, nama Timor-Timur berubah menjadi Timor-Leste, dan diakui secara internasional sebagai merdeka dan berdaulat.

B. Kondisi Demografis dan Geografis Timor-Leste

1. Kondisi Demografis

Jika dilihat dari kondisi demografis, jumlah penduduk Timor-Leste berdasarkan hasil sensus tahun 2015 mencapai 1.183.643 juta jiwa, dengan jumlah laki-laki 601,112 ribu jiwa, sementara perempuan berjumlah 582,531 ribu jiwa. Jumlah penduduk paling banyak berada di ibu kota Dili yaitu 277.279 ribu jiwa. Dari jumlah penduduk ini, terlihat adanya peningkatan sebanyak 11% atau sebesar 100,833 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2010, dimana, pada tahun 2010 jumlah penduduk Timor-Leste hanya mencapai 1.066,409 juta jiwa (Ferreira, 2017:9) dengan jumlah laki-laki sebanyak 541,147 ribu, dan perempuan sebanyak 525,435 ribu (timor-leste.gov.tl, 2010). Menurut Menteri Keuangan (*Ministru Finansas*), Helder Lopes, jumlah ini belum termasuk penduduk Timor-Leste yang berada di luar negeri, yaitu, baik di Portugal, Indonesia, Cuba, Brazil, China, Amerika dan lain-lain (Oliveira, 2015).

Secara entitas masyarakat Timor-Leste berasal dari dua kelompok etnis yaitu; kelompok etnis Austronesia (*Malayo-Polynesian*). Kelompok ini termasuk kelompok yang berbahasa Tetun, Mambai, Tokodede, Galoli, Kemak, Baikeno, dan etnis Melanesian (*Papuan*) antara lain kelompok

yang berbahasa Bunak, Fataluku, Makasai). A. A. Mendes Corrêa (1944) dalam Gunn (2005) mengatakan terdapat empat tipe rasial dasar yang ada di Timor-Leste, yaitu tipe Melayu-Kuno (Indonesia), tipe *deutero*-Melayu (Mongoloid), Melanesoida, dan tipe *vedo*-Australoida (Corrêa 1944 *cit* Gunn, 2005:48-49). Namun, jika dilihat dari sejarahnya penduduk asli Timor-Leste berasal dari keturunan Australoid dan Malanesia (National Statistics Directorate, *et al.* 2010:34). Sejalan dengan ini, Barros (1993:29) dalam Savio (2015:19) mengatakan bahwa penduduk Timor-Leste merupakan campuran antara suku bangsa Melayu dan Malanesia, sebagian kecil merupakan keturunan bangsa Portugis. Ketika bangsa Portugis melepaskan Timor-Portugis, penduduk di daerah ini hanya mencapai 680.000 penduduk, dengan 97% keturunan Timor termasuk mistiso, 2% keturunan Tionghoa, serta 1% penduduk Portugis Savio (2015:19).

Terdapat beberapa agama yang ada di Timor-Leste antara lain, Katolik Roma, Protestan, Islam dan Hindu. Berdasarkan data dari CIA (*Central Intelligence Agency*), pada tahun 2015 sebanyak 97.6% masyarakat Timor-Leste yang menganut agama Katolik Roma, Protestestan 2% dan Muslim 0.2% (CIA, 2017). Jumlah ini berbanding terbalik dengan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1992 dimana jumlah 90% masyarakat Timor-Leste menganut agama Katolik Roma, sebanyak 4.0% beragama Islam, 3.0% Protestan dan 0.5 Hindu (International Religious Freedom *et al.*, 2001). Sementara itu, Geoffrey C. Gunn (2005) mengatakan bahwa, dibawah kekuasaan Portugis hingga tahun 1975 hanya terdapat 20-25 penduduk Timor-Leste yang menganut agama Katolik. Hal ini dikarenakan kuatnya unsur ritual tradisional seperti pemujaan terhadap rumah adat (*uma lulik*) atau pemujaan terhadap barang peninggalan kuno yang diletakkan di *uma lulik* (Gunn, 2005:57). Pemujaan ini masih berlanjut hingga sekarang.

Dalam hal bahasa, Pulau Timor diduduki oleh dua keluarga bahasa yaitu keluarga Austronesia dan keluarga non-Austronesia (Papua). Di bagian barat Timor, terdapat dua

bahasa Austronesia yaitu bahasa Atoni dan bahasa Tetun. Sementara itu di bagian Timur setidaknya terdapat empat belas jenis bahasa yang selain tetun meliputi Mambai, Makasai, Kemak, Bunak, Tokodede, Galoli, Dagada, dan Baiqueno (Dawan). Bahasa Tetun sendiri terbagi dalam dua jenis yaitu Tetun Terik dan Tetun Praça. Menurut Cliff Morris Tetun terik digunakan di bagian barat daya Timor bagian Timur dan bagian Timur laut dari Timor bagian barat atau yang sering disebut Timor Belu. Sementara Tetun praça juga disebut dengan tetun Dili adalah *lingua franca* yang digunakan di zaman kolonial Portugis (Gunn, 2005:61-62)

Paska Merdeka, Timor-Leste secara resmi menggunakan dua jenis bahasa sebagai bahasa *official*, yaitu bahasa Tetum dan bahasa Portugis. Sementara itu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kerja, selain itu sebagian mata kuliah di perguruan tingkat tinggi masih menggunakan bahasa Indonesia. Untuk komunikasi sehari-hari, masyarakat di kota Dili menggunakan bahasa Tetum Prasa, sementara di daerah seperti Suco kebanyakan masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa tradisional seperti Adbae, Atauro, Baikeno, Bekais, Bunak, Dadu'a, Fataluku, Galoli, Habun, Idalaka, Idate, Isni, Kairui, Kemak, Lakalai, Lolein, Makalero, Makasae, Makuva, Mambai, Mideki, Nanaek, Neueti, Rahesuk, Raklungu, Resuk, Sa'ane, Tetun Prasa, Tetun Terik, Tokodede dan Waimaha (Hays, 2015).

2. Kondisi Geografis

Secara astronomis Timor-Leste terletak diantara garis $123^{\circ}25' - 127^{\circ}19'$ BT dan $8^{\circ}17' - 10^{\circ}22'$ LS dan menempati sebagian besar bagian timur dari pulau Timor. Termasuk pula pulau Atauro dan Jaco di bagian ujung timur, serta enklave Oecussi yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia (Savio, 2015:18). Sedangkan secara biogeografis, Timor-Leste berada di daerah transisi antara benua Australia dan Asia yang disebut dengan Wallacea (Asian Development Bank, 2014:10).

Sebagai negara yang terletak diantara negara Indonesia dan Australia, Timor-Leste memiliki perbatasan secara langsung dengan kedua negara tersebut. Bagian utara Timor-Leste berbatasan dengan Laut Sawu¹ dan Selat Wetar², pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Timor yang terpisah dari Pulau Australia, perbatasan bagian barat dengan Provinsi NTT, Indonesia (National Statistics Directorate *et al.*, 2010:35) dan bagian timur berbatasan dengan Laut Banda³ (Savio, 2015:18).

Timor Leste memiliki luas wilayah 14.919 km² (National Statistics Directorate, 2006 *cit.* National Statistics Directorate *et al.*, 2010:35). Luas tersebut terdiri dari luas daratan pada bagian timur Pulau Timor dengan luas 13.670 km² (Barros, 1993:7 *cit.* Savio, 2015:19) dan ditambah luas *enclave* Oecuss seluas 2500 km². Luas Pulau Atauro yang terletak di sebelah utara Dili seluas 144 km² dan Pulau Jaco 8 km² (Sandlund *et al.*, 2001 *cit.* Asian Development Bank, 2014:11), serta memiliki panjang garis pantai 706 km² (Asian Development Bank, 2014:10).

Secara umum, geografi Timor-Leste sebagian besar terdiri dari daerah pegunungan dan perbukitan dengan 44% dari luas wilayahnya merupakan daerah dengan kemiringan 40% atau lebih (Ministry of Economy and Development, 2012:37). Menurut Barros (1993) terdapat tujuh gunung yang ketinggiannya lebih dari 2.000 mdpl, diantaranya adalah

-
- ¹ . Laut Sawu adalah laut yang terdapat di antara Pulau Sumba, Pulau Sawu, Pulau Rote, Pulau Timor, dan Pulau Flores.
 - ² . Selat Wetar adalah selat yang memisahkan bagian timur dari pulau Timor dengan pulau Wetar. Selat ini berada di antara Indonesia (utaranya) dan Timor Leste (selatannya). Di baratnya ada Pulau Atauro sementara di timurnya adalah bagian selatan dari Laut Banda dan bagian paling selatan dari kepulauan Maluku.
 - ³ . Laut Banda adalah sebuah laut yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Laut berukuran 500x1.000 km ini terpisah dari Samudra Pasifik oleh beratus-ratus pulau, serta Laut Halmahera dan Seram.

gunung Tatamailau yang juga sering disebut dengan gunung Ramelau, Sabira, Usululi, Hutapai, Lakuloho, Keblake, dan gunung Metebian. Sedangkan Gunung Tatamailau sendiri merupakan titik tertinggi dari Timor-Leste yang berada pada ketinggian 3.000 mdpl (Ministry of Economy and Development, 2012). Untuk daerah dataran tinggi negara ini membentang di Maliana dan Baucau, sedangkan dataran rendahnya berada di sekitar tepi pantai sebelah selatan dan utara dengan rata-rata lebarnya dua sampai empat km (Savio, 2015:17-19). Dataran pesisir di selatan terdiri dari rawa dan delta sungai (World Vision, 2015). Timor-Leste memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang menyebabkan cuaca menjadi panas dan lembab (National Statistics Directorate *et al.*, 2010).

Secara administratif Timor-Leste dibagi menjadi 13 *município* (district) 67 *Posto-Administrativo* (kecamatan), dan 498 *Suco* (*Village*) dan 2.225 *Aldeia* (*Hamlet/dusun*) (Governor Timor-Leste, 2012). Ke 13 distrik tersebut adalah Ainaro (luas area 797 km²), Alieu (luas area 729 km²), Baucau (1.494 km²), Bobonaro (1.368 km²), Coba-Lima (1.226 km²), Dili (327 km²), Ermera (746 km²), Lautem (1.702 km²), Liquiçá (543 km²), Manatuto (1.706 km²), Manufahi (1.325 km²), Oecussi (815 km²), dan Viqueque (1.781 km²). Sebanyak 30% penduduk Timor-Leste memilih untuk tinggal di perkotaan dan sisanya tinggal di daerah pedesaan (National Statistics Directorate *et al.*, 2010).

C. Sistem Politik dan Pemerintahan Timor-Leste

Sebagai negara demokrasi, bentuk negara Timor-Leste adalah Republik dengan sistem pemerintahan semi-presidensial. Kepala negara dipimpin oleh seorang presiden dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Baik presiden maupun Perdana Menteri sama-sama memiliki 5 (lima) tahun masa jabatan (Soesmith, 2003:12).

Presiden Republik dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang bersifat universal, bebas, rahasia dan pribadi dengan sistem berdasarkan mayoritas suara

sah tanpa menghitung suara kosong. Presiden terpilih akan diambil sumpah dan dilantik oleh presiden Parlemen Nasional dihadapan para anggota Parlemen Nasional pada hari terakhir masa jabatan presiden republik demisioner. Jika presiden meninggal, mengundurkan diri atau menyandang cacat tetap, maka fungsinya akan dijalankan sementara oleh Presiden Parlemen Nasional yang akan disumpah oleh anggota Parlemen sebelum 90 hari dilakukan pemilihan presiden republik yang baru (UUD RDTL pasal 76,77 dan 82). Sementara itu, Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai mayoritas parlemen atau koalisi partai mayoritas parlemen, kemudian diangkat dan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional (UUD Timor-Leste tahun 2002 pasal 106 ayat 1), (Sahin, 2007:7).

Presiden Timor-Leste memiliki fungsi hanya sebatas seremonial, namun Ia juga memiliki hak veto undang-undang dan memiliki wewenang untuk membubarkan Parlemen Nasional apabila terdapat krisis kelembagaan yang parah, yang menghalangi pembentukan Pemerintahan atau pengesahan Anggaran Negara, membubarkan Pemerintahan dan menghentikan Perdana Menteri terbaru apabila terjadi dua kali penolakan terhadap program kerja yang ditawarkan kepada Parlemen Nasional, mengumumkan perang dan mewujudkan perdamaian atas usulan pemerintah dan Dewan Tinggi Pertahanan dan Keamanan, dan lain-lain (UUD RDTL pasal 85 dan 86).

Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau kabinet Pemerintahan. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai-partai pemenang mayoritas atau koalisi partai mayoritas parlemen. Sedangkan anggota pemerintahan atau para menteri dan wakil menteri diangkat oleh Presiden Republik atas usulan Perdana Menteri (UUD RDTL Pasal 106 ayat 1 dan 2).

Timor-Leste menganut sistem unikameral dalam sistem pemerintahan, yaitu hanya terdapat satu badan legislatif yang dinamakan Parlemen Nasional (*Parlamento Nasional*) (Sahin,

2007). Parlemen Nasional terdiri dari sekurang-sekurangnya 52 (limapuluh dua) dan sebanyak-banyaknya 65 (enampuluh lima) anggota (CIA, 2017).

Jika dilihat dari sejarahnya, Kabinet pertama Timor-Leste dibentuk pada 30 November 1975 setelah Fretilin secara unilateral memproklamasikan kemerdekaan Timor-Leste 28 November 1975, dimana Nikolau Lobatu terpilih sebagai Perdana Menteri (timor-leste.gov.tl, 2012). Namun kabinet ini hanya berjalan selama 9 hari. Hal ini dikarenakan pada tanggal 7 Desember 1975 Indonesia melakukan aneksasi dan menguasai Timor-Leste.

Setelah melepaskan diri dari NKRI, Timor-Leste kembali membentuk kabinetnya setelah peralihan kekuasaan dari UNTAET kepada pemerintah Timor-Leste pada 20 Mei 2002. Kabinet ini dinamakan *I Governo Constitucional* atau Kabinet Pemerintah Konstitusional Pertama (timor-leste.gov.tl, 2009) yang dikepalai oleh Mari Bin Amude Alkatiri (Anonim, 2009). Kabinet ini hanya berjalan hingga bulan Juni 2006. Hal ini dikarenakan adanya *resuffle* (*remodelação*) dalam kabinet akibat krisis politik yang terjadi pada waktu itu (Montlake, 2006).

Kabinet lanjutan dari *I Governo Constitucional* Timor-Leste adalah *II Governo Constitucional* atau Kabinet Pemerintahan Konstitusional Kedua. Kabinet ini dibentuk pada 10 Juli 2006 setelah Mari Alkatiri mundur dari jabatan Perdanana Menteri akibat krisis politik yang terjadi pada tahun 2006. Kabinet ini dipimpin oleh José Manuel Ramos Horta (liputan6, 2009) dengan dua wakil Perdana Menteri yaitu Estanislau A. Leixo da Silva sebagai wakil I dan Rui Maria Araújo sebagai wakil II (Lusa, 2006). Kabinet ini hanya berjalan setahun yaitu mulai dari 10 Juli 2006 hingga 20 Mei 2007 (Greenlees, 2007).

Setelah Perdana Menteri Ramos Horta terpilih menjadi presiden Timor-Leste melalui pemilihan presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada 8 Mei 2007 (Wahyono, 2012). Maka terjadi adanya *resuffle* dalam kabinet kedua, dimana Estanis A. da Silva terpilih sebagai Perdana Menteri

dan Rui Maria de Araujo sebagai wakilnya. Kabinet lanjutan ini dinamakan *Terceiro Governo Constitucional* dibentuk pada 18 Mei 2007 (timor-leste.gov.tl, 2009). Kabinet ini juga hanya berjalan dari bulan Mei hingga bulan Juni 2007. Sehingga kabinet ini hanya diutamakan untuk mempersiapkan pemilihan parlemen tahun 2007.

Setelah Ramos Horta terpilih menjadi presiden, Ia memilih kelompok AMP (*Alianca Maioria Parlamentar*) yang dibentuk oleh koalisi partai CNRT, PSD-ASDT dan PD untuk membentuk kabinet (Wahyono, 2012). Kabinet ini kemudian dinamakan *Quarto Governo Constitucional* atau Kabinet Pemerintahan Timor-Leste yang ke-empat yang dipimpin oleh Xanana Gusmão dengan dua wakil Perdana Menteri yaitu José Luís Guterres sebagai Wakil I dan Mário Viegas Carrascalão sebagai wakil II (Lusa, 2007). Kabinet ke-empat mulai berjalan pada 8 Agustus 2007 hingga tahun 2012.

Pada pembentukan kabinet ke V atau *Quinto Governo Constitucional*, Xanana Gusmão kembali terpilih menjadi Perdana Menteri, dengan Fernando La Sama de Araújo sebagai wakil Perdana Menteri. Kabinet kelima dibentuk pada 8 Agustus 2012 (timor-leste.gov.tl, 2012). Kabinet ke-lima hanya berjalan selama 3 tahun. Hal ini dikarenakan adanya resuffle pemerintahan Timor-Leste pada tahun 2015. Dimana Perdana Menteri Xanana Gusmão menyerahkan jabatan Perdana Menteri kepada Rui Maria de Araujo yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri pada waktu itu (Anonim, 2015). Maka terbentuklah kabinet ke VI atau *Sexto Governo Constitucional* Timor-Leste untuk periode 2015 hingga 2017. Kabinet pemerintahan Timor-Leste terakhir adalah kabinet pemerintahan ke-VII atau *Setimo Governo Constitucional*. Kabinet ini dipimpin oleh Mari Bin Amude Alkatiri yang dilantik pada 15 September 2017 (UCCLA, 2017)

Pembagian kekuasaan di Timor-Leste terbagi dalam 4 kekuasaan antara lain; Presiden Republik, Parlemen Nasional (Legislatif), Pemerintah (eksekutif) dan Makhama Agung atau Lembaga Peradilan (Yudikatif). Parlemen Nasional merupakan lembaga kedaulatan Republik Demokratik Timor-

Leste yang mewakili semua warga negara Timor-Leste dan diberikan wewenang legislatif, pengawasan dan pengambilan keputusan politik. Parlemen Nasional dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat bebas, langsung, sama, rahasia dan pribadi. Sesuai dengan fungsinya, Parlemen Nasional memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk membuat Undang-Undang mengenai persoalan-persoalan dasar yang menyangkut kebijakan dalam dan luar negeri (UUD RDTL tahun 2002 pasal 94 dan 95).

Pemerintah adalah badan kedaulatan yang bertanggung jawab sebagai pengarah dan pelaksanaan kebijakan umum negara dan merupakan badan Pemerintahan Umum tertinggi. Pemerintah terdiri atas Perdana Menteri, para menteri dalam kabinet dan para sekretariat negara. Perdana Menteri akan ditunjuk oleh partai politik atau oleh koalisi partai-partai politik yang mempunyai mayoritas perwakilan dalam Parlemen dan akan dilantik oleh Presiden Republik, setelah berkonsultasi dengan partai-partai politik yang menduduki kursi dalam Parlemen Nasional. Sementara anggota-anggota Pemerintah lainnya akan diangkat oleh Presiden Republik atas usulan perdana Menteri. Setelah diangkat Perdana Menteri mengajukan program pemerintah yang mencakup tujuan-tujuan dan tugas yang akan dilaksanakan untuk periode lima tahun ke Parlemen Nasional untuk dipertimbangkan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah yang sangat penting adalah menyiapkan Garis Besar Haluan Negara dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara serta melaksanakannya setelah disahkan oleh Parlemen Nasional (UUD RDTL, 2002). Sementara itu, Pengadilan adalah badan kedaulatan dengan wewenang untuk menegakkan keadilan atas nama rakyat.

D. Kondisi Ekonomi Sosial Politik Timor-Leste

Sebagai negara yang baru 15 tahun merdeka, kondisi ekonomi Timor-Leste belum stabil akibat sering terjadinya krisis politik dalam negeri. Namun demikian, Timor-Leste telah berhasil mencapai beberapa pencapaian. Berdasarkan

data dari Bank Dunia, pada tahun 2015 Timor-Leste digolongkan sebagai negara dengan tingkat perekonomian medium. Hal ini dapat dilihat dari posisi Index Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) Timor-Leste pada tahun 2015 berada di urutan 133 dari jumlah 188 negara di dunia (UNDP, 2016).

Berdasarkan data dari Bank Dunia, angka kemiskinan pada tahun 2016 mencapai 41.8%, angka tersebut sudah relatif membaik jika dibandingkan dengan tahun 2014 dimana sebanyak 50% masyarakat Timor-Leste hidup dalam garis kemiskinan (World Bank, 2017). Sementara itu, tingkat pengangguran justru meningkat dari 3.1% di tahun 2014 sampai 4 % di tahun 2016 (tradingeconomics, 2017). Pertumbuhan GDP (*GDP Growth*) perkapita pada tahun 2016 meningkat menjadi 5.4% dari 4% pada tahun 2015 (Asian Development Bank, 2017).

Pada mulanya pertumbuhan ekonomi Timor-Leste berfluktuasi tajam, karena ketergantungan perekonomiannya terhadap sumber daya alam minyak dan kopi. Laju inflasi cukup tinggi. Penyebabnya adalah persoalan *supply bottlenecks*. Namun demikian, sejak tahun 2007, pertumbuhan ekonomi tidak lagi berfluktuasi tajam, bahkan hampir selalu di atas 10%. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Timor-Leste mencapai sebesar 5.0%. Hasil ekspor komoditas kopi tiga tahun terakhir mencapai \$ 30.0 miliion (World Bank.2017). Bahkan di Asia sendiri pertumbuhan ekonomi Timor-Leste tahun 2016 mencapai 5.5%, berada di atas posisi Indonesia dan Papua Nugini yang masing-masing mencapai 5.02 dan 5.4% (Kuwado *et al.*, 2017).

Guna meningkatkan perekonomian dalam negeri, Presiden Timor-Leste, Fransico Guterres Lú Ólo dalam kampanyenya berjanji akan memperkuat politik luar negeri di Asia Tenggara dan dunia. Dalam hal ini, Lú Ólo ingin memperkuat hubungan kerja sama bilateral melalui penempatan para duta besar Negara-negara sahabat (Herman *et al.*, 2017). Lú Ólo juga berjanji akan membangun negara mulai dari akar rumput, Ia ingin mengubah nasib warga

Timor-Leste di semua sektor, baik itu sektor kesehatan, pendidikan, serta kehidupan ekonomi yang berkelanjutan (Murdoch. 2017).